



## UPAYA MENEKAN PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DI MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN NONFORMAL

Muhammad Ancha Sitorus<sup>1(\*)</sup>, Evalina Franciska Hutasoit<sup>2</sup>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sumatera Utara, Indonesia

[ancha.sitorus@gmail.com](mailto:ancha.sitorus@gmail.com)<sup>1</sup>, [evalinafranciska@gmail.com](mailto:evalinafranciska@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

Received: 28 Juli 2021  
Revised: 02 September 2021  
Accepted: 26 September 2021

Penelitian ini merupakan kajian diharapkan dapat memberikan gambaran upaya dalam menekan permasalahan kependudukan di masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan nonformal yang dibangun melalui pendekatan pendidikan kependudukan. Peningkatan akses pendidikan nonformal tidak terlepas dengan pemetaan modal sosial di masyarakat. Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan nasional, karenanya peningkatan kualitas hidup menjadi salah satu agenda pembangunan ditengah permasalahan pertumbuhan penduduk. Upaya peningkatan kualitas oendiduk dipengaruhi oleh arah pembangunan, dan tidak terlepas dari dinamika masyarakat diantaranya potensi, permasalahan dan kemiskinan. Dengan masih tingginya angka putus sekolah dari tahun ke tahun terutama pada masa pandemic Covid-19, maka pendidikan informal dan pendidikan nonformal menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masalah kependudukan seperti pernikahan usia anak, laju pertumbuhan penduduk, serta kemiskinan dan pengangguran. Dengan hanya sekitar 55,8 persen keluarga Indonesia yang mengetahui isu kependudukan dengan disparitas antara masyarakat perkotaan dan pedesaan serta berdasarkan tingkat kekayaan, maka penanaman isu kependudukan merupakan Langkah awal untuk membangun kesadaran masyarakat yang mandiri dan terutama daoat menjangkau kelompok rentan dalam masyarakat. Modal sosial berperan dalam proses membangun masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengembangkan program. Penguatan kesepakatan dan pemetaan sosial menjadi kunci utama dengan keterlibatan berbagai pihak untuk ikut dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan informal. Pendidikan kependudukan diintegrasikan dengan pendidikan informal dibangun dalam kurikulum dengan materi berdasarkan isu kearifan lokal yang disusun bersama disampaikan untuk membangun kesadaran dan tetap bertahan terutama dalam masa pandemi Covid-19.

**Keywords:** Pendidikan Informal, Pendidikan Kependudukan, Modal Sosial

(\*) Corresponding Author: Sitorus, [ancha.sitorus@gmail.com](mailto:ancha.sitorus@gmail.com), +62 8137 5985 074

**How to Cite:** Sitorus, M. A., & Hutasoit, E. F. (2021). Upaya Menekan Permasalahan Kependudukan Di Masyarakat Melalui Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal. *Research and Development Journal of Education*, 7 (2), 474-482.

## INTRODUCTION

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan nasional. Penduduk merupakan modal untuk mengelola sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta menjadi pelaksana pengaturan kehidupan masyarakat (Tjaja, n.d.). Oleh karena itu, peningkatan kualitas hidup dan kualitas masyarakat Indonesia menjadi salah satu agenda pembangunan nasional (Bappenas RI, 2014). Di sisi lain, penduduk yang berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah jangka

panjang yang dihadapi pemerintah Indonesia, dengan masalah pertumbuhan penduduk yang masih menjadi salah satu perhatian. Dengan jumlah penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa (BPS, 2021), Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia.

Penyiapan penduduk yang berkualitas merupakan tugas semua pihak. Sesuai dengan sasaran jangka panjang dan tujuan pembangunan nasional (Bappenas RI, 2014), jika tantangan dan masalah pembangunan penduduk tidak ditangani dengan serius dan menyeluruh, maka jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban dalam pembangunan. Kualitas penduduk dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya rata-rata umur hidup, pendidikan dan pendapatan yang saling berkaitan dengan indikator pembangunannya lainnya, antara lain derajat kesehatan, kemiskinan, partisipasi sekolah (UNDP, 2020). Oleh karena itu, arah pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Pembangunan harus memperhatikan potensi yang ada, dinamika sosial, serta permasalahan di masyarakat. Berbagai macam permasalahan saat ini seperti tingginya jumlah kemiskinan, lowongan kerja yang tidak memadai, kesempatan dalam pendidikan, serta masalah pemukiman.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengendalian kependudukan telah menyelenggarakan berbagai program peningkatan kualitas penduduk. Hal ini dilakukan melalui penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Pelaksanaan GDPK antara lain pencanangan program kampung keluarga berkualitas dan pelaksanaan layanan kontrasepsi (BKKBN, 2020). Program pembangunan keluarga dilaksanakan melalui berbagai upaya diantaranya upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan kependudukan. Secara formal, upaya ini dilakukan melalui program kerja sama pendidikan kependudukan jalur sekolah. Selain itu, pendidikan kependudukan dilakukan dengan pendekatan non formal melalui program pendidikan dan pelatihan; serta pendekatan informal melalui kelompok kegiatan keluarga/masyarakat (BKKBN, 2015). Adapun isu strategis terkait permasalahan penduduk antara lain mencakup jumlah dan komposisi penduduk, migrasi serta perkembangan wilayah perkotaan. Disamping itu, isu pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan komposisi penduduk produktif juga menjadi hal penting yang perlu menjadi perhatian (BKKBN, 2019).

Berdasarkan Survey Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) Tahun 2019, indeks pengetahuan keluarga mengenai isu kependudukan, adalah 55,8 persen. Berdasarkan wilayah, masyarakat di wilayah perkotaan menunjukkan indeks pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat di pedesaan (58,1 persen dibanding 53,6 persen). Disamping itu, indeks kekayaan juga menunjukkan tren yang sama, dimana keluarga dengan indeks kekayaan teratas memiliki pemahaman isu kependudukan yang lebih tinggi (58,8 persen) dibandingkan dengan keluarga pada indeks kekayaan bawah (53,2 persen) (BKKBN & BPS, 2019). Ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman keluarga Indonesia terkait isu kependudukan sehingga diperlukan upaya sebagai sarana peningkatan pengetahuan keluarga di Indonesia.

Penyebarluasan program pendidikan kependudukan juga dapat dilaksanakan dengan pendekatan jalur pendidikan informal. Melihat data hasil SKAP 2019 diatas, maka program pendidikan kependudukan jalur informal dapat difokuskan kepada masyarakat di daerah pedesaan dan keluarga dengan indeks kekayaan bawah. Penanaman isu kependudukan dalam keluarga merupakan salah satu langkah awal untuk membangun kesadaran masyarakat, sehingga secara mandiri keluarga akan berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2003)

dimana pendidikan informal di masyarakat dapat diselenggarakan oleh keluarga dan lingkungan dengan bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Disisi lain, kualitas pendidikan juga masih menjadi topik penting dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas. Fenomena siswa putus sekolah dapat terjadi di sekolah pedesaan maupun di perkotaan. Untuk Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2019/2020 angka putus sekolah SMP sebanyak: 3.403 jiwa, SMA sebanyak: 2.326 Jiwa dan SMK: 3.741 jiwa, jumlah ini masih sangat besar jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia (Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2020). Munculnya fenomena dengan banyaknya jumlah putus sekolah atau masyarakat tidak dapat menyelesaikan satu jenjang pendidikan formal di sekolah disebabkan karena beberapa alasan. Kajian terdahulu yang dilakukan oleh Mujiati et al., (2018) menunjukkan bahwa beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak putus sekolah adalah pendidikan orang tua yang masih rendah, akses anak terhadap layanan pendidikan, lingkungan dan kondisi tempat tinggal keluarga. Hal-hal tersebut diatas serta pandangan masyarakat yang masih menganggap pendidikan tidak menjadi unsur utama dan prioritas dalam kehidupan, dapat menyebabkan anak yang masih sekolah menjadi lebih mudah terpengaruh untuk putus sekolah.

Permasalahan pendidikan di Indonesia juga masih mencakup tidak meratanya akses pendidikan dan perluasan akses, masih belum baiknya daya saing mutu serta relevansi materi kedalam kehidupan. Disamping itu, masih terdapat masalah pembiayaan pendidikan yang mahal serta permasalahan pengelolaan Pendidikan. Karena itu, diperlukan perubahan-perubahan dalam sektor pendidikan dengan kebijakan daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan (Suryana, 2020).

Putus sekolah erat kaitannya dengan masalah sosial dan aspek kependudukan lain seperti kasus nikah anak, kemiskinan, serta peningkatan pengangguran dan kriminalitas (Hutasoit, 2020; Quraisy & Arifin, 2017; Rahmi & Adry, 2018). Mengingat pentingnya pendidikan dalam rangka membangun kualitas sumberdaya manusia, dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003), Negara juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang putus sekolah agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan layanan pendidikan melalui layanan pendidikan non formal. Mengingat pendidikan kependudukan diharapkan dapat menekan permasalahan sosial di masyarakat, maka akses pendidikan nonformal tidak terlepas dengan pemetaan modal sosial di masyarakat.

## **METHODS**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulisan dilakukan di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan analisis data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pengelola program kependudukan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan (*desk research*). Data sekunder diperoleh dari dokumen yang relevan dengan tema penulisan, yang terdiri dari, jurnal, buku, serta publikasi dari situs lembaga. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai dari awal penulisan. Dalam penelitian ini terdapat langkah-langkah dalam analisis data, di antaranya yakni Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan (Moleong, 2006). Hasil analisis data penelitian disajikan dalam bentuk narasi.

## RESULTS & DISCUSSION

Pendidikan kependudukan yang terintegrasi dalam pendidikan informal merupakan salah satu upaya strategis dalam pemecahan permasalahan kependudukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat terutama yang terdampak COVID - 19. Tahapan awal dalam pengintegrasian pendidikan kependudukan adalah pemetaan modal sosial. Secara sederhana, modal sosial merupakan kepercayaan yang mengakar dalam faktor budaya, baik berupa etika dan moral, yang dapat digunakan sebagai jalan untuk menciptakan pemahaman kesepakatan bersama dan nilai kepercayaan bagi orang-orang didalamnya. Menurut Bank Dunia (1999, dalam Smith, 2009) modal sosial adalah norma, institusi dan hubungan sosial yang membentuk kualitas interaksi sosial dalam masyarakat, serta institusi dan hubungan sosial yang memungkinkan orang dapat bekerja sama. Menurut Mashud et al., (2010), hubungan sosial didasari oleh rasa saling percaya, dan kepercayaan tersebut akan membangkitkan semangat kebersamaan dan solidaritas sosial yang tinggi, sehingga akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan pada jangka panjang.

Modal sosial merupakan suatu proses yang akan terus mengalami perkembangan dan terus akan meluas seiring perkembangannya. Modal sosial dianggap sebagai ciri-ciri organisasi sosial yang meliputi kepercayaan, norma dan jaringan kerja. Yang membedakan modal sosial dengan modal yang lainnya adalah modal sosial tidak akan mengalami pengurangan bila digunakan, malah akan terus berkembang. Karena itu, modal sosial bukan juga mendorong orang untuk melakukan kegiatan bersama. Hal ini dikarenakan mudahnya koordinasi tindakan bersama yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dalam masyarakat (Mashud, 2010). Pemanfaatan modal sosial akan semakin membaik bila digunakan terus menerus. Faktor yang umum dan saling berpengaruh dalam modal sosial adalah pendidikan, kelas ekonomi maupun sosial, pelaku, kebiasaan, dan nilai internal dalam pelaku. Modal ini memiliki dasar pada norma, gagasan, relasi sosial dan norma sebagai salah satu asset yang berharga (Bhandari & Yasunobu, 2009).

Modal sosial tidak terlepas dari sumberdaya manusia, yang meliputi pengetahuan, kecakapan dan keterampilan individu. Kecakapan tersebut merupakan salah satu karakteristik dari kewirausahaan. Pendekatan modal manusia mendasarkan pada pemikiran bahwa investasi dalam satu bidang akan memberikan keuntungan dalam bidang lain, dan pada akhirnya akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, investasi dalam bidang pendidikan akan mendorong kualitas sumberdaya, dan sumberdaya yang berkualitas tersebut nantinya akan mendorong keuntungan dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan sosial dan ekonomi dapat diperoleh secara individual maupun kolektif melalui investasi pada *human capital*. Mereka secara aktif harus berusaha memperoleh pengetahuan melalui pendidikan formal untuk membangun kredibilitas. Modal manusia dianggap sebagai senjata utama dalam memerangi kemiskinan. Oleh karena itu individu secara berkelanjutan harus melakukan investasi pada modal manusia atau *human capital* dalam rangka mengembangkan dan mempertahankan kreativitas mereka (Reimers-Hild et al., 2007). Keterikatan modal sosial akan menghasilkan kesertaan semua elemen masyarakat, media yang sesuai, prinsip masyarakat yang saling menjaga, kemampuan memobilisasi sumberdaya dalam semua anggota kelompok (Kusumastuti, 2016).

Modal sosial dalam pendidikan kependudukan dapat dijelaskan sebagai produk hubungan manusia satu sama lain, khususnya hubungan yang dekat dan berkelanjutan. Hubungan ini ditandai dengan adanya kerja sama dengan pola interelasi timbal balik dan saling menguntungkan, yang dibangun di atas kepercayaan berdasarkan norma dan nilai sosial. Menurut Badaruddin (2005) teori modal sosial terdiri dari: 1(1) Karakteristik

Komunitas Sosial, (2) Jaringan dan Dukungan, (3). Tindakan Kolektif, (4) Kepercayaan, (5) Solidaritas, (6) Keharmonisan.

Karakteristik komunitas sosial dapat dipetakan oleh petugas dan masyarakat peduli kependudukan dengan memperhatikan keberlanjutan kegiatan atau sebuah gerakan yang populis. Komunitas yang dipilih diharapkan mampu untuk menciptakan program dengan tujuan maupun pembagian tugas yang jelas. Di masyarakat, beberapa komunitas yang bisa dimanfaatkan dalam integrasi pendidikan kependudukan non formal adalah karang taruna, remaja masjid/ gereja, kelompok kegiatan masyarakat maupun kegiatan rutin keagamaan. Pembangunan jaringan dan dukungan dibentuk dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan informal. Jaringan tersebut antara lain melibatkan pemerintah desa atau kelurahan sebagai pembina kegiatan dengan petugas KB lapangan sebagai motor penggerak.

Pemetaan masyarakat peduli kependudukan dilakukan dengan melakukan identifikasi pihak-pihak strategis yang dapat dijadikan sebagai mitra pelopor, dan kemudian menjadi penggerak program pendidikan kependudukan kepada masyarakat. Mitra terkait antara lain seperti LSM/ LSOM, pemuka agama, figur kemasyarakatan, dan tokoh/pemimpin adat yang dianggap sebagai mitra strategis. Tokoh pelopor hasil identifikasi kemudian dapat diberikan materi pendidikan kependudukan, yang dilanjutkan dengan penguatan kesepakatan dengan petugas lapangan KB dan kader pengelola program di lapangan. Penyebarluasan informasi dan materi pendidikan kependudukan di masyarakat dapat dilakukan secara berjenjang dengan pemanfaatan berbagai media berbasis kearifan lokal seperti pertemuan keagamaan, musyawarah masyarakat desa, melalui radio komunitas, atau melalui kegiatan kesenian.

Tindakan kolektif ditandai dengan pengambilan keputusan dengan keterlibatan seluruh pihak dalam masyarakat. Dengan terlibatnya berbagai pihak termasuk para tokoh, kader dalam setiap kegiatan rapat koordinasi (rakor) tingkat desa/ kelurahan, maka rencana pelaksanaan pendidikan kependudukan dapat diintegrasikan dengan aktivitas di kelompok masyarakat dengan dukungan sumberdaya desa dan kelurahan. Sehingga, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu kependudukan, dan dapat memunculkan kesadaran mengenai pentingnya persoalan kependudukan dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya dapat dilakukan sosialisasi dalam kelompok masyarakat oleh anggota kelompok yang telah mendapat sosialisasi pendidikan kependudukan. Jika memungkinkan. Kegiatan sosialisasi dapat menghadirkan tokoh lainnya yang memiliki kompetensi di bidang yang disampaikan. Materi yang disampaikan juga dapat dikembangkan sesuai dengan isu strategis di wilayahnya atau dikaitkan dengan aktivitas dalam kelompoknya. Jika anggota kelompok menyadari bahwa dampak kependudukan erat dengan aktivitas kelompoknya atau kejadian setempat maka memudahkan fasilitator dalam mempersuasi anggota kelompok mengenai pentingnya pendidikan kependudukan.

Pembangunan kepercayaan dimulai dengan adanya hasil nyata yang telah dilakukan oleh komunitas informal peduli kependudukan. Kepercayaan yang terjalin antar masyarakat terlihat saat pembagian kerja dan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui kegiatan informal. Semua sasaran diharapkan mendapatkan pengalaman pembelajaran kependudukan untuk mendapatkan pengalaman yang sama dengan harapan terjadi perubahan perilaku masyarakat terutama pada masyarakat rentan dalam hal ini anak muda yang putus sekolah. Untuk itu, tahapan awal penguatan dan penegasan menjadi penting untuk membangun kepercayaan.

Pengembangan pendidikan kependudukan melalui pemberdayaan seluruh elemen masyarakat harus bersifat penguatan dasar komunitas karena adanya kegiatan dalam berbagai ikatan komunitas di masyarakat seperti domisili, pekerjaan, agama, ataupun ketertarikan tiap individu dalam karakteristik yang berbeda. Dalam pengembangan

pendidikan kependudukan, kebijakan yang diambil harus berdasarkan dan mengakomodasi modal sosial semua elemen masyarakat sehingga bisa menjadi kekuatan di masyarakat (Wirutomo, 2012). Melalui pendidikan kependudukan ini juga diharapkan akan muncul solidaritas di masyarakat untuk secara bersama sama membangun kesadaran mengenai dampak kependudukan dan berusaha berubah untuk memperbaiki kehidupannya. Perubahan ini dapat dilihat melalui peningkatan partisipasi sekolah formal dan non formal anak putus sekolah, gotong royong dalam mengatasi kemiskinan, serta peningkatan life skill dimasyarakat. Masyarakat terutama dalam komunitas informal secara proaktif berpartisipasi dan mencari jalan terhadap masalah kependudukan dan keterlibatan semua pihak di masyarakat. Pendidikan ini erat kaitannya dengan aspek pemberdayaan dan merupakan dasar dari peningkatan kesadaran di masyarakat. Pendidikan non formal merupakan usaha dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan derajat melalui pengembangan potensi pada tiap anggota masyarakat dan dengan kemampuan dalam diri sendiri mereka memiliki upaya dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan melalui program pendidikan dengan harapan mereka mampu berdaya saing terutama dalam menghadapi tantangan di masyarakat terutama masa pandemi COVID-19 (Fathy, 2019).

Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul keharmonisan yang tercipta di sebuah komunitas karena adanya hubungan antar individu yang secara sadar tidak ingin memicu permasalahan yang berujung pada konflik dan mampu mengatasi masalah di masyarakat. Pemetaan sasaran utama dalam penyampaian isu kependudukan, terutama terhadap golongan masyarakat rentan diharapkan mampu memunculkan kesadaran untuk mampu kembali berusaha dan berdaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Terutama pada masa pandemi Covid-19 ini, kerentanan masyarakat dapat dipetakan melalui kegiatan informal untuk dipecahkan bersama. Terutama anak-anak putus sekolah dan penguatan *life skill* sehingga mampu meningkatkan daya saing di masyarakat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Modal sosial dan pemberdayaan masyarakat saling berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan dalam konteks inklusif, dalam keberhasilan pembangunan terutama dalam pengembangan pendidikan kependudukan, modal sosial dapat menjadi kerangka utama dalam penentuan kebijakan di mulai dari perencanaan terendah di tingkat desa (Fathy, 2019).

Masyarakat dalam pandemi Covid-19 menunjukkan rasa tanggap tinggi dalam melindungi sesama anggota masyarakat. Sesama warga memberikan dukungan bagi kelompok yang terdampak Covid-19. Penguatan kegiatan informal dan pendidikan kependudukan diharapkan mampu menggalang solidaritas sosial agar warga dapat berpartisipasi dalam mengatasi masalah sosial. Masyarakat dengan modal sosial kemudian mendapatkan pencerahan baru dalam penerapan kebijakan publik di level dasar, kemudian mampu membentuk institusi sebagai wadah perumusan tanggapan bersama (Regus, 2020). Masalah kependudukan adalah masalah bersama, untuk itu dalam mengatasi permasalahannya, keterlibatan semua di level komunitas menjadi penting dalam pembangunan kesadaran dan memunculkan semangat gotong royong dalam memecahkan masalah di masyarakat terutama dalam pandemi Covid-19. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal terutama dalam integrasi pendidikan kependudukan merupakan proses dalam peningkatan taraf hidup dan kesadaran masyarakat untuk secara sadar meningkatkan pengetahuan yang di dapatkan dari lembaga yang menyelenggarakan pendidikan non formal sehingga masyarakat yang terlibat dapat mengubah kehidupannya menuju keluarga yang lebih sejahtera (Miradj & Sumarno, 2014).

## CONCLUSION

Salah satu modal utama dalam pembangunan adalah penduduk yang berkualitas. Dalam peningkatan kualitas penduduk, arah pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan serta dinamika masyarakat dengan memperhatikan berbagai macam potensi, kondisi saat ini, serta permasalahan di masyarakat. Jumlah anak putus sekolah atau masyarakat tidak dapat menyelesaikan satu jenjang pendidikan formal menjadi masalah terutama di masa pandemi Covid-19. Kasus putus sekolah erat kaitannya dengan masalah kependudukan dan sosial seperti peningkatan kasus nikah anak, kemiskinan, serta pengangguran. Integrasi pendidikan kependudukan dalam jalur pendidikan informal merupakan alternatif membangun kesadaran masyarakat dan kemandirian yang menjangkau masyarakat terutama golongan masyarakat rentan. Pembangunan di masyarakat tidak terlepas dari penguatan modal sosial dengan melibatkan semua pihak termasuk dalam pendidikan informal. Modal sosial membangun masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengembangkan program. Penguatan kesepakatan dan pemetaan sosial menjadi kunci utama dengan keterlibatan berbagai pihak untuk ikut dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan informal. Pendidikan kependudukan diintegrasikan dengan pendidikan informal dibangun dalam kurikulum dengan materi berdasarkan isu kearifan lokal yang disusun bersama disampaikan untuk membangun kesadaran dan tetap bertahan terutama dalam masa pandemi Covid-19.

Pengembangan pendidikan kependudukan melalui pemberdayaan seluruh elemen masyarakat harus bersifat penguatan dasar komunitas karena adanya kegiatan dalam berbagai ikatan komunitas di masyarakat seperti domisili, pekerjaan, agama, ataupun ketertarikan tiap individu dalam karakteristik yang berbeda. Dalam pengembangan pendidikan kependudukan, kebijakan yang diambil harus berdasarkan dan mengakomodasi modal sosial semua elemen masyarakat sehingga bisa menjadi kekuatan di masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan pembangunan konstruktif yang memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kemandirian dalam masyarakat untuk dapat bertahan di masa pandemi Covid-19 terutama kejadian putus sekolah untuk kembali belajar pada pendidikan formal atau nonformal sebagai perwujudan wajib belajar setiap anggota masyarakat.

## ACKNOWLEDGEMENT

Penelitian ini telah diseminarkan pada Duconomics Sci-meet 2021, sebuah pertemuan ilmiah bidang pendidikan dan ekonomi. Hasil dari perhelatan tersebut adalah publikasi ilmiah dalam bentuk prosiding pada situs <https://s.id/Duconomics>. Naskah ilmiah ini merupakan hasil tindak lanjut dari perhelatan tersebut dengan beberapa penyempurnaan.

## REFERENCES

- Badaruddin. (2005). *Modal Sosial (Social Capital) dan Pemberdayaan Komunitas Nelayan*. Pustaka Pelajar.
- Bappenas RI. (2014). *Buku I.: Agenda Pembangunan Nasional Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Bhandari, H., & Yasunobu, K. (2009). What is Social Capital? A Comprehensive Review of the Concept. *Asian Journal of Social Science*, 37(3), 480–510. <https://doi.org/10.1163/156853109X436847>
- BKKBN. (2015). *Profil Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. (2019). *Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal, Informal*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. (2020). *Panduan Penyusunan Grand Design Kependudukan 5 Pilar*. BKKBN.
- BKKBN, & BPS. (2019). *Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) Keluarga Tahun 2019*.
- BPS. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>
- Hutasoit, E. F. (2020). Pernikahan Usia Dini dan Pelanggaran Hak Anak. In B. Setiawan & M. R. M. Damanik (Eds.), *Bunga Rampai Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga* (pp. 107–130). IPB Press.
- Kusumastuti, A. (2016). Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4740>
- Mashud, M., Sutinah, & Sudarso. (2010). *Sosiologi Pembangunan*. Universitas Terbuka.
- Miradj, S., & Sumarno, S. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 101. <https://doi.org/10.21831/jppm.v1i1.2360>
- Mujiati, Nasir, & Ashari, A. (2018). Faktor - Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 18(3), 271–281.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi. (2020). *Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Tingkat Tiap Provinsi Tahun 2019/2020*. Statistik Pendidikan. <http://statistik.data.kemdikbud.go.id>
- Quraisy, H., & Arifin, J. (2017). Kemiskinan dan Putus Sekolah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(2). <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i2.498>
- Rahmi, M., & Adry, M. R. (2018). Pengaruh Tingkat Putus Sekolah, Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Ecosains*, 7(2), 147–154.
- Regus, M. (2020). Pentingnya Revitalisasi Modal Sosial Paska Pandemi Covid-19. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11. <https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.575>
- Reimers-Hild, C. I., Fritz, S. M., & King, J. W. (2007). Entrepreneurial Career Development: Using Human Capital, Social Capital, and Distance Education to Achieve Success. *Advancing Woman in Leadership Online Journal*, 23(Spring). <http://www.advancingwomen.com/awl/spring2007/reimers.htm>
- Suryana, S. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Edukasi*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971>
- Tjaja, R. P. (n.d.). *Menuju Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2020*. Retrieved June 30, 2021, from [https://www.bappenas.go.id/files/3113/5228/3135/ratna\\_\\_20091015140133\\_\\_2376\\_\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3113/5228/3135/ratna__20091015140133__2376__0.pdf)
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2003).
- UNDP. (2020). *The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene*. Human

Development Reports. <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN#>  
Wirutomo, P. (2012). *Sosiologi Untuk Jakarta: Menuju Pembangunan Sosial Budaya*.  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta.